

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KELAS II
Triwulan Ke- III**

TAHUN 2026

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
PASTI OK!
Reformasi Birokrasi
Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi,
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
YES!!!

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II

Disahkan Tanggal : 1 Oktober 2026

Berlaku sejak tanggal : 1 September 2026 s/d 30 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada tahun 2026 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 1 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei	4
BAB II METODOLOGI.....	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya.....	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12
3.2.6 Indeks pada indikator hadiah	12

3.2.7	Indeks pada indikator transparansi biaya	13
3.2.8	Indeks pada indikator percaloan	13
3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP..... 17

4.1.	Kesimpulan.....	17
4.2.	Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Model alur penyusuna survey IPK Menuju ZI.....	7
Tabel 2.	Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	7
Tabel 3.	Nilai Persepsi	8
Tabel 4.	Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5.	Jenis pekerjaan responden	10
Tabel 6.	Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	10
Tabel 7.	Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	11
Tabel 8.	Indeks Menjual Pengaruh.....	11
Tabel 9.	Indeks pada Transaksi Biaya	11
Tabel 10.	Indeks pada Biaya Tambahan.....	12
Tabel 11.	Indeks pada Hadiah	12
Tabel 12.	Indeks pada indikator transparansi biaya	13
Tabel 13.	Tabel indeks pada Percaloan.....	13
Tabel 14.	Indeks pada indikator Perbuatan Curang	14
Tabel 15.	Indeks pada indikator Transaksi rahasia	14
Tabel 16.	Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	15
Tabel 17.	Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.....	15
Tabel 18.	Masukan dan pandangan pengguna layanan	16

LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Data Umum Responden
3. Hasil Perhitungan IPK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2017, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang akan di tetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
 - e. Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun)

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap

mukadan melalui Website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

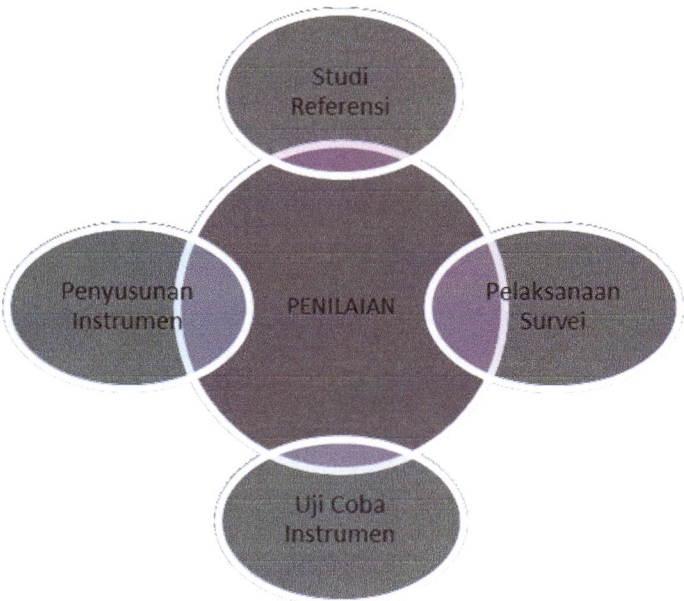
2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi

korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

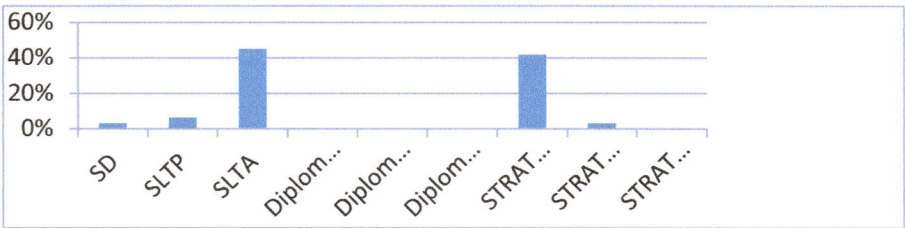
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebesar 45%.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

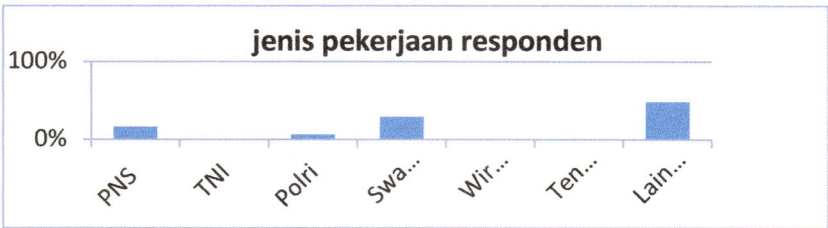


3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 48% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki pekerjaan sebagai Pekerjaan Lainnya, PNS 16%, 0% TNI ,6% Polri, dan 29% Swasta, 0% Wirausaha dan 0% Tenaga Kontrak

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

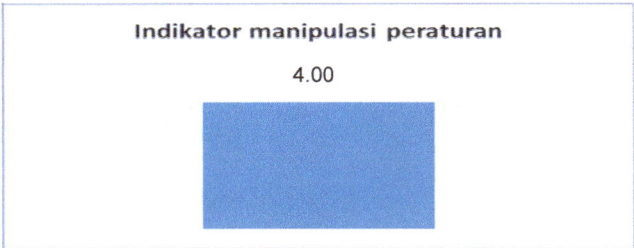


3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

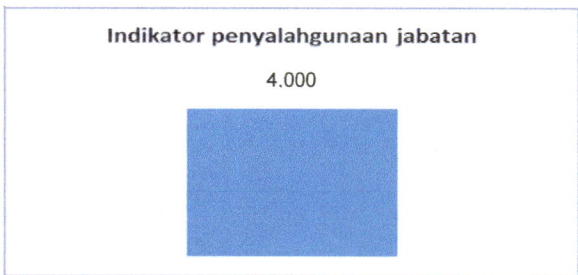
Tabel 6.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,844. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

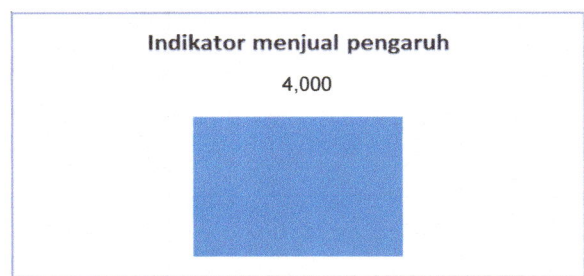
Tabel 7.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan menjual pengaruh.

Tabel 8.
Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam tindakan Transaksi Biaya.

Tabel 9.
Indeks pada indikator transaksi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

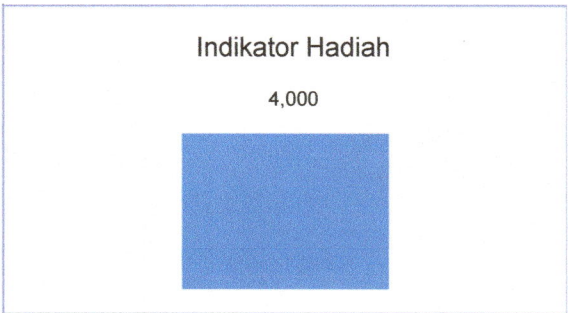
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Biaya Tambahan.

Tabel 10.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan



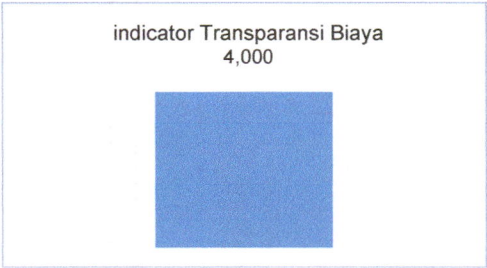
3.2.6. Indikator Hadiah
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Hadiah.

Tabel 11.
Indeks pada indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Indikator Transparansi Biaya.

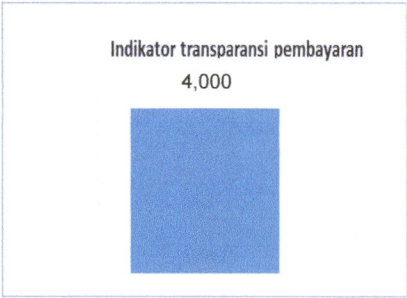
Tabel 12.
Indeks pada indikator Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam hal Percaloan.

Tabel 13.
Indeks pada indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

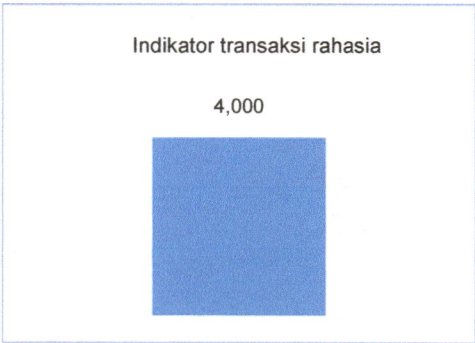
Tabel 14.
Indeks pada indicator Perbuatan Curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Transaksi Rahasia ;

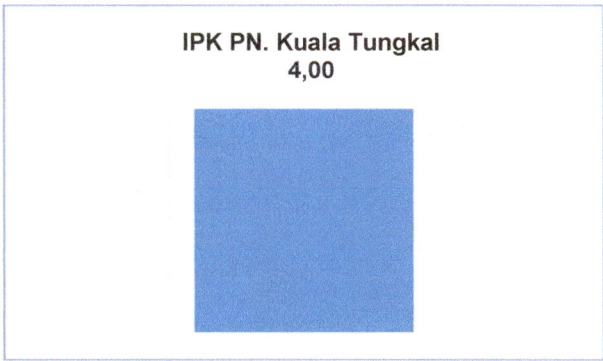
Tabel 15.
Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebesar 4,00

Tabel 16.
Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II



Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 100,00

Tabel 17.
Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Adapun masukan dari responden diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 18.Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

No	Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
1	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah baik dalam memberikan pelayanan yang bersih
2	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melakukan tugas dengan professional dan akuntabel
3	Pelayanan yang diberikan cepat, baik dan memuaskan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 dengan nilai Interval 100,00%** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,000;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000;
7. Indikator Transparansi Biaya , mendapat indeks 4,000;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 4,000;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,000;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000;

Secara Keseluruhan Indikator masing – masing memiliki indeks 4,000;

4.2. Rekomendasi

1. Merujuk pada hasil indeks persepsi triwulan III tahun 2026 pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun 2026 tersebut diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks 4,000. Dengan demikian kedepannya agar perlu dipertahankan kinerjanya oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari Pimpinan, Hakim, Staf, PPPK dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI
KUALA TUNGKAL

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Sertifikasi Mutu Pengadilan
Unggul dan Tangguh



Menuju WBK dan WBBM



2026

LAPORAN SURVEY HARIAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PERIODE BULAN SEPTEMBER 2026



pn_kualatungkal
@yahoo.co.id



pn-kualatungkal.go.id



(0742)
21202 - 7351000

LAPORAN SURVEY HARIAN KEPANITERAAN HUKUM

Seiring dengan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, penyelenggara pelayanan publik, khususnya Badan Peradilan dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Peradilan saat ini belum tentu memenuhi harapan masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik Badan Peradilan melalui Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Mahkamah Agung RI mempunyai program Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum (AMPUH) yang memiliki salah satu program di dalamnya yaitu melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melaksanakan survey kepuasan kepada pengguna layanan di PTSP.

Pelaksanaan Survey Harian menggunakan aplikasi esurvey badilum yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan monitoring tentang kualitas layanan dan kinerja para pegawai dan staf PTSP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Adapun hasil rekapitulasi dari pelaksanaan survey harian yang dilaksanakan di bulan September 2026 adalah sebagai berikut:

Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
	PENGADILAN NEGERI		
1. PIDANA	KUALA TUNGKAL	PUAS	30 September 2026
	PENGADILAN NEGERI		
2. PIDANA	KUALA TUNGKAL	PUAS	30 September 2026
	PENGADILAN NEGERI		
3. PIDANA	KUALA TUNGKAL	PUAS	30 September 2026
	PENGADILAN NEGERI		
4. PIDANA	KUALA TUNGKAL	PUAS	28 September 2026
	PENGADILAN NEGERI		
5. PIDANA	KUALA TUNGKAL	PUAS	28 September 2026

Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
	PENGADILAN NEGERI		
1. PERDATA	KUALA TUNGKAL	PUAS	30 September 2026
	PENGADILAN NEGERI		
2. PERDATA	KUALA TUNGKAL	PUAS	23 September 2026
	PENGADILAN NEGERI		
3. PERDATA	KUALA TUNGKAL	PUAS	23 September 2026

Meja Pelayanan Hukum

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
1. HUKUM	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	PUAS	30 September 2026

Meja Pelayanan INZAGE

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Meja Pelayanan Umum

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
1. UMUM	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	PUAS	30 September 2026

Meja Pelayanan Ecourt

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
1. ECOURT	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL	SANGAT PUAS	28 September 2026

Meja Pelayanan PHI

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Meja Pelayanan Tipikor

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Meja Pelayanan Niaga

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Meja Pelayanan Perikanan

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Meja Pelayanan Kepaniteraan

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Meja Pelayanan Kesekretariatan

Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
---------------------------	--------------	-----------------	-----------------

NIHIL

Demikianlah laporan Survey Harian ini dibuat dan disusun oleh Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan sebenar – benarnya.

Kuala Tungkal, 1 Oktober 2026
Panitera Muda Hukum



MUTMAINAH, S.H.

	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL Tim sertifikAsiMutuPengadilanUnggulDantanguH (AMPUH)	
	Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam, TanjungJabung Barat, Jambi 36514	
	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN	

Nomor : 2006/KPN.W5-U3/UND.OT1.2/IX/2026 Kuala Tungkal, 30 September 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Survey Harian Bulan September 2026

Yth. 1. Hakim
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Pejabat Struktural
5. Pejabat Fungsional
6. Staf, dan PPPK
Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Di_
Kuala Tungkal

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara Monitoring dan Evaluasi Survey Harian Bulan September 2026 pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Acara : Monitoring dan Evaluasi Survey Harian

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Joni Mauluddin Saputra, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN
SURVEY HARIAN**



MONITORING DAN EVALUASI SURVEY HARIAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

No	Kegiatan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana	Masalah	Tindak Lanjut	Indikator Keberhasilan
1	Monev Survey Harian Bulan September Tahun 2026	Seluruh Pegawai	Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Tim Survey	NIHIL	NIHIL	Apabila nilai Survey Harian secara terus menerus mengalami peningkatan dan kinerja pelayanan yang meningkat

Kesimpulan : Bahwa laporan survey Harian bulan September tahun 2026 yang telah diperoleh secara umum menunjukkan hasil yang sangat memuaskan

Rekomendasi: Dengan demikian kedepannya harus selalu ditingkatkan kinerjanya dan sebagai bahan dalam melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari Pimpinan, Hakim, staf, & PPPK dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;



Kuala Tungkal, 30 September 2026
Ketua Pengadilan Negeri,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H., M.H.

	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL Tim sertifikAsiMutuPengadilanUngguldantangguH (AMPUH) Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam, TanjungJabung Barat, Jambi 36514 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN	
--	--	---

NOTULA

- Dasar

Hari

Tanggal

Pukul

Tempat

Acara

: - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

: Rabu

: 30 September 2026

: 09.00 WIB s/d selesai

: Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

: Monitoring dan Evaluasi Survey Harian

Peserta Rapat : Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf, dan PPPK.

Jalannya Rapat :

Pada Hari Ini Rabu, 30 September 2026 pukul 09.00 WIB, Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Telah Melakukan Monev Survey Harian bulan Agustus Tahun 2026 kepada Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Penyampaian Ketua:

Dengan Hasil Survey Harian bulan September Tahun 2026 yang telah didapat dan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan demikian kedepannya agar kinerja oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari Hakim, Pimpinan, Staf, dan PPPK agar selalu ditingkatkan dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Demikian notulen ini dibuat dan ditandatangani oleh notulen rapat, dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.



Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.,M.H.

Kuala Tungkal,30 September 2026
Notulen Rapat,

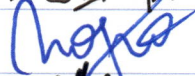
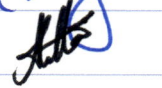
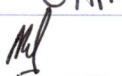
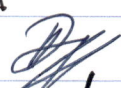
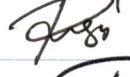
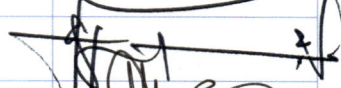
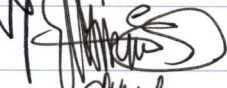
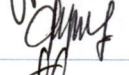
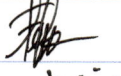
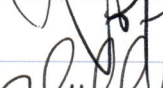
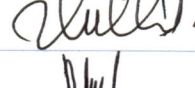


SEPTIA KHOIRUNNISA A.Md.T.

	PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL Tim sertifikAsiMutuPengadilanUnggulDantanguH (AMPUH)	
	Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH., Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam, TanjungJabung Barat, Jambi 36514	
	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN	

DAFTAR HADIR MONEV SURVEY HARIAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2026

Hari/Tanggal: Rabu, 30 September 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.	KETUA	
2	ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	
3	MOKOARI SIMAMORA, S.H.,M.H.	HAKIM	
4	SANDY ALETTA SINAGA, S.H., M.H.	HAKIM	
5	DWI ASTUTI NURJANAH, S.H.	HAKIM	
6	MELVA CHRISTIEN MANURUNG, S.H.	HAKIM	
7	DIPA RIVALDI, S.H.	HAKIM	
8	FALIH FAKHRI FADHILLAH, S.H.	HAKIM	
9	RIZKY MUTIARASARI, S.H.	HAKIM	
10	TARSICIUS BATISTUTA TELAUMBANUA, S.H.	HAKIM	
11	SUKADI, S.H.,M.H.	PANITERA	
12	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	SEKRETARIS	
13	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	PANMUD PIDANA	
14	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.	PANMUD PERDATA	
15	MUTMAINAH, S.H.	PANMUD HUKUM	
16	PURNAMASARI, S.H.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
17	NORA, S.H.	KASUBBAG UMUM & KEU	
18	YURI ANDRIYANSYAH, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
19	LISTIONO RAHMADI, S.T.	PRANATA KOMPUTER	
20	FITRIYANTI, S.H.	JURU SITA	
21	ABDUL HALIM	JURU SITA	
22	SUPRIYADI	JURU SITA PENGGANTI	
23	LUTHFIAH FARADILLA,S.M.	ARSIPARIS PELAKSANA	
24	NOVALIA MARBUN, S.H.	ANALIS PERKARA	
25	ALMIRA WAROSA, A.Md.A.B.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN**



26	DAVID SONLY TAMBUNAN, S.T.	DOKUMENTALIS HUKUM	
27	BENNY AGUSTIAN, A.Md.	DOKUMENTALIS HUKUM	
28	LELLY YESSI KARTINA M, A.Md.A.B.	DOKUMENTALIS HUKUM	
29	SEPTIA KHOIRUNNISA, A.Md.T.	DOKUMENTALIS HUKUM	
30	KHALISHAH AMALIA A, A.Md.A.B.	DOKUMENTALIS HUKUM	
31	AHMAD PADILLAH, S.H.	PPPK	
32	NANDA DWI NOVANSYAH, S.H.	PPPK	
33	HAMRONI	PPPK	
34	KIKI AMELIA	PPPK	
35	SUKARSIH PRANSISKA SARI	PPPK	
36	RINI MELATI	PPPK	
37	SOPIYAN	PPPK	
38	SUHARTONO	PPPK	
39	SYAHRULLAH	PPPK	
40	HENGKI SAPUTRA	PPPK	
41	SUGIYONO	PPPK	

PETUGAS DAFTAR HADIR

Lelly Yessi Kartina M, A.Md.A.B.



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Tim sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Jl. Prof. DR. Sri Soedewi MS, SH.,
Kel. Pembengis, Kec. Bram Itam,
Tanjung Jabung Barat, Jambi 36514

**SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEY HARIAN**



DOKUMENTASI RAPAT MONEV SURVEY HARIAN

BULAN AGUSTUS TAHUN 2026

